

Berebut Manisnya Tebu

Studi tentang perolehan akses program bantuan tebu di Lhokcane, Kab. Bener Meriah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Galeh Prabowo
Universitas Gadjah Mada
galeh.prabowo23@gmail.com

Abstract

An Introduction of sugarcane is apparently able to create an interesting social phenomenon among peasants in Lhokcane. It has led to the entry of commodity competition in access to land and sugarcane assistance program. The reality of it is about the emergence of inequality both ownership and control over economic resources. Therefore, this paper aims to understand the process of acquisition of land and access to assistance programs cane.

Key words : sugarcane, access, land, and inequality

Pendahuluan

Sejarah manusia erat kaitannya dengan permasalahan agraria. Masyarakat Indonesia rupanya tak luput dari pusaran problema tersebut. Berbagai macam kasus perebutan tanah perkebunan hingga pengusuran masyarakat dari sumber penghidupannya seringkali terdengar.

Sebagai bagian dari persoalan agraria, fenomena ketimpangan kepemilikan tanah perkebunan di Indonesia perlu mendapatkan kajian yang mendalam. Mengingat negara ini memiliki tanah perkebunan seluas 21.615.806 Ha (Direktorat Jendral Perkebunan, 2013). Di sisi lain, problema mengenai kepemilikan maupun penguasaan tanah sudah berlangsung lama.

Sewaktu Indonesia lahir sebagai sebuah negara republik kesatuan, sebenarnya pemerintah langsung berhadapan dengan masalah penguasaan tanah khususnya di Jawa, Bali, dan beberapa daerah kantong berpenduduk padat di pulau-pulau besar di luar Jawa dan Bali (Tjondronegoro, 2008, p. xii) .

Hingga pada akhirnya, presiden Soekarno memutuskan untuk membuat undang-undang yang mengatur kondisi agraria di Indonesia. Pembuatan peraturan ini bertujuan melindungi hak rakyat atas tanah dan pemanfaatan sumberdaya alam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, timbulah upaya rezim Soekarno untuk mengadakan *land reform* supaya pendistribusian tanah berlangsung secara adil. Belum juga usaha tersebut mencapai keberhasilan, *land reform* mengalami kemacetan ketika digantikan oleh pemerintahan Soeharto.

Kemacetan program *land reform* terjadi lantaran perbedaan pandangan politik mengenai agraria. Rezim Orde Lama memiliki pandangan bahwa tanah untuk kepentingan rakyat dan petani miskin, berbeda dengan Orde Baru. Orientasi politik agraria rezim Orde Baru adalah mendukung investasi-investasi skala besar (Bachriadi dan Wiradi, 2011, p.6). Tak heran jika pada masa Soeharto, tanah diprioritaskan untuk kepentingan modal dalam negeri maupun luar negeri.

Bersamaan dengan hal itu, munculah berbagai macam komoditi tanaman dalam bingkai perkebunan yang mulai mengubah wajah tanah di negeri ini. Masuklah beberapa pemilik modal besar yang berinvestasi di dalamnya. Situasi ini selebihnya menciptakan ketimpangan kepemilikan maupun penguasaan tanah yang terus berlangsung. Ketimpangan terlihat diantara pihak yang bertanah luas dengan pihak yang bertanah sempit atau tak bertanah. Bahkan, hingga kini nilai ketimpangannya cenderung mengalami peningkatan.

Dalam penelitiannya dari lima sensus pertanian (1963-2003), Bachriadi dan Wiradi (2011) mengungkapkan bahwa jumlah petani tak bertanah hanya menurun sekali pada periode 1973-1983, kemudian terus meningkat mulai dari periode 1983-1993 hingga 1993-2003. Dengan demikian, masih banyak petani yang belum mampu mendapatkan akses kepemilikan tanah.

Pengaruh kebijakan Orde Baru terkait dengan introduksi komoditi tanaman perkebunan secara massif turut serta dirasakan masyarakat dusun Lhokcane. Komoditi tanaman tebu mulai menerpa kawasan ini semenjak tahun 2010.

Melalui kebijakan program bantuan tebu, pihak pemerintah Bener Meriah secara berkelanjutan memperkenalkan komoditi tersebut. Implikasinya jelas terlihat, moda produksi kapitalis merambah pada kehidupan petani Lhokcane.

Proses itu kemudian menimbulkan persaingan diantara berbagai pihak. Tujuannya yaitu memperoleh akses sumberdaya ekonomi yang berupa tanah dan program bantuan tebu. Pelaksanaan program bantuan ini bukannya berjalan mulus tanpa melahirkan persoalan ke depannya. Situasi tersebut senada dengan kajiannya Tania Li dalam "The Will to Improve" yang memaparkan bahwa berbagai program yang dengan penuh niat dirancang untuk mengubah keadaan masyarakat lebih baik, justru memunculkan permasalahan baru (2012, p.1).

Proses perebutan sumberdaya di Lhokcane pada akhirnya menciptakan ketimpangan dalam kepemilikan maupun penguasaan atas tanah serta program bantuan tebu. Terlebih lagi, realitas ketimpangan nampak menonjol pada kepemilikan tanah di kampung ini.

Keterbatasan sumberdaya ekonomi mampu menimbulkan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Fenomena kompetisi dalam perebutan akses mewarnai kehidupan petani Lhokcane. Hal ini membentuk ketimpangan atas kepemilikan dan penguasaan sumberdaya ekonomi. Untuk itu, kajian ini akan membahas bagaimana perebutan akses tanah dan program bantuan tebu berlangsung di Lhokcane.

Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu selama tiga bulan pada awal tahun 2013. Pelaksanaan penelitian ini secara spesifik berlangsung di dusun Lhokcane, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kawasan ini tepatnya berada di dataran tinggi Gayo. Kajian ini menggunakan beberapa metode penelitian. Metode yang digunakan di antaranya metode etnografi dan metode survei. Dalam pemakaian metode etnografi, peneliti menggunakan beberapa jenis instrumen pengumpul data. Instrumen tersebut berupa observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sejarah hidup (*life history*). Sementara penggunaan metode survei dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan kuisioner.

Kerangka Teori

Masuknya komoditi tebu membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan petani Lhokcane. Pengaruh ini terutama menimpa pada salah satu unsur kebudayaan yang berupa mata pencaharian (Koentjaraningrat, 2000). Mereka yang sebelumnya menanam tanaman jagung, kini harus beralih ke komoditi tebu atas permintaan pihak pemerintah Bener Meriah. Bersamaan dengan

diluncurkannya program itu, maka terbentuklah suatu relasi produksi baru di kalangan mereka.

Kehadiran sumberdaya ekonomi baru menyedot perhatian sebagian besar petani Lhokcane. Kompetisi memperebutkannya berlangsung diantara mereka. Dalam hal ini, mereka berupaya memperoleh akses program bantuan tebu. Sementara itu, mereka juga harus mampu mengakses tanah. Hal ini supaya sumberdaya ekonomi yang pertama dapat diproduksi guna memenuhi kebutuhan hidup serta menghasilkan keuntungan. Kedua sumberdaya ekonomi itu yang nantinya menjadi objek petani Lhokcane didalam ajang "Berebut Manisnya Tebu".

Fenomena kompetisi di atas semakin terlihat jelas ketika kebijakan pengembangan komoditi tebu mulai diterapkan di kawasan ini. Berpijak dari keadaan tersebut, perlu pemahaman atas aset dan akses. Hal ini dikarenakan kedua elemen tersebut saling mempengaruhi. Aset awal seringkali mempengaruhi perolehan akses yang nantinya berimbas pada terbentuknya aset akhir. Melalui tulisannya, Peluso dan Ribbot (2003, p.153) mendefinisikan konsep akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat ataupun keuntungan dari suatu hal termasuk obyek material, orang, institusi, dan simbol. Konsep ini secara sederhana memaparkan lebih jauh bahwa perolehan akses tidak tergantung pada "kepemilikan" atas sumberdaya yang diinginkan.

Seseorang dapat memperoleh manfaat atas sumberdaya tertentu sekalipun mereka tidak memiliki "hak" atas kepemilikan. Dengan kata lain, orang itu mempunyai akses guna mendapatkan manfaat atas sumberdaya tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang bisa memperoleh akses melalui pihak lain yang mempunyai hak atas kepemilikan sumberdaya.

Perolehan akses dikalangan petani Lhokcane tentunya tidak terjadi dengan sendirinya. Melekatnya perolehan akses pada seseorang karena adanya konstruksi sosial di tengah masyarakat. Secara spesifik, Peluso dan Ribbot menjelaskan bahwa "...the ability to benefit from resources is mediated by constraints established by the specific political-economy and cultural frames within which access to resources is sought" (2003, p.164). Maka dari itu, untuk ke depannya penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik.

Secara sederhana Barry menuturkan pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejumlah aktor dengan tujuan-tujuan tertentu dan suatu usaha deduktif untuk membuat bagaimana orang-orang akan berbuat dalam situasi-situasi yang memberikan alternatif-alternatif tertentu, "dengan asumsi bahwa mereka mengejar tujuan-tujuannya secara rasional" (dalam Popkin, 1986, p.25)

Terdapat beberapa faktor yang membangun atas terwujudnya akses tersebut.

Peluso dan Ribot (2003) mengungkapkan bahwa faktor yang dimaksud antara lain : teknologi, ketenaga kerjaan, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial (p.165). Beberapa faktor itulah yang akan membentuk perolehan akses pada diri seseorang. Hal ini berarti pula bahwa beberapa faktor itu yang disebut sebagai aset awal pada diri seseorang. Melalui pemahaman ini nantinya saya akan mengetahui alasan beberapa petani Lhokcane mampu mengakses sumberdaya ekonomi, baik berupa tanah maupun modal dari program bantuan tebu. Serangkaian faktor itulah yang nantinya saya sebut sebagai aset awal.

Sejarah Kehidupan Lhokcane

Kawasan Aceh seringkali dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu daerah konflik (Tippe, 2001, p.5). Selama puluhan tahun, kondisi keamanannya dalam keadaan labil. Konflik antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintahan Republik Indonesia (RI) menjadi pemicu ketidakstabilan keamanan di Aceh. Alhasil, gejala pertikaian itu mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Ketenangan warga Aceh terganggu lantaran peristiwa memanas yang tidak kunjung usai. Akibatnya, banyak tanah pertanian maupun perkebunan yang ditinggalkan oleh para pemiliknya.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai sejarah Lhokcane akan saya awali melalui pelukisan kondisi masyarakat di dusun Lhokcane yang terbagi atas dua periode. Periode pertama berlangsung ketika masyarakat di dusun Lhokcane menjalani kehidupannya semasa konflik Aceh. Periode kedua terjadi ketika para anggota korban konflik Aceh didatangkan ke wilayah ini.

Dalam hal ini, saya membedakan keduanya menjadi dua kategori. Kategori pertama yang digunakan untuk menyebut masyarakat di dusun tersebut yaitu masyarakat eks. Lhokcane. Mereka adalah penghuni dusun Lhokcane yang menjalani kehidupannya semasa konflik Aceh berlangsung. Dengan kata lain, masyarakat eks. Lhokcane menjalani kehidupan di dusun tersebut sebelum perdamaian diantara pihak GAM dan RI terjalin (tahun 2005). Kategori kedua yang digunakan untuk menyebut penghuni Lhokcane pasca konflik yakni masyarakat Lhokcane. Konsep ini diperuntukkan bagi para korban konflik Aceh yang didatangkan untuk mengisi kembali area di dusun Lhokcane.

Pada tahun 1997, kawasan Lhokcane telah berpenghuni. Masyarakat eks. Lhokcane semasa itu tergolong cukup heterogen. Mereka berasal dari beraneka ragam kesukubangsaan, diantaranya masyarakat bersukubangsa Jawa dan Gayo. Sebelumnya, wilayah Lhokcane secara administrasi masih berupa Rukun Tetangga (RT). Sekitar tahun

2000, terjadi pemekaran yang mengakibatkan kawasan Lhokcane berubah menjadi sebuah dusun. Jumlah kepala keluarga yang bertempat tinggal tergolong banyak. Penghuninya pada tahun 2000 sekitar 69 kepala keluarga. Mereka ini sebagian besar berasal dari luar daerah Lhokcane yang mencoba untuk mencari sumber penghidupan di lokasi ini. Mereka pun kemudian bekerja pada sektor pertanian.

Komoditas yang ditanam tergolong beragam, di antaranya kopi, tebu, pinang, dan beberapa tanaman sayuran. Hingga pada akhirnya, daerah Lhokcane mengalami perubahan ketika konflik di Aceh kembali meledak. Pada pertengahan tahun 2000, dampak konflik Aceh melanda dusun Lhokcane. Meledaknya konflik tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat eks. Lhokcane. Para anggota GAM saat itu menyuruh warga eks. Lhokcane supaya meninggalkan pemukimannya.

Dampaknya terjadi eksodus secara masal dari pemukiman Lhokcane. Mereka memutuskan berpencar ke berbagai daerah di luar propinsi Aceh. Tidak hanya pemukimannya saja yang diambil alih oleh pihak GAM, tetapi juga tanah pertaniannya. Kawasan Lhokcane pada akhirnya dikuasai oleh anggota GAM sebagai tempat persembunyiannya. Selang dua tahun kemudian, persembunyian para anggota GAM terdeteksi oleh tentara nasional Indonesia (TNI). Mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian para anggota GAM yang ada di Lhokcane. Penyerangan ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan bagi pemerintah Indonesia. Para anggota GAM yang menduduki dusun Lhokcane dapat dimusnahkan. Wilayah Lhokcane kembali sunyi tanpa adanya kehidupan manusia.

Kondisi Politik Lokal : HMKKA dan Kuasa Bupati Ghofar

Di awal tahun 2006, kawasan kabupaten Bener Meriah dikuasai oleh seorang Bupati baru yakni Ghofar. Menurut informasi dikalangan petani Lhokcane, Ghofar merupakan penentang GAM yang kini telah menduduki kursi pemerintahan daerah. Dugaan ini semakin terlihat jelas ketika Ghofar berhasil mendapatkan tanah luas di dusun Lhokcane. Perolehan tanah ini ia peroleh ketika situasi konflik berkecamuk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Semasa berlangsungnya konflik diantara GAM dan NKRI, Ghofar mampu membeli sebagian besar tanah di Lhokcane yang ditinggalkan oleh penduduknya dengan harga murah, yakni sekitar dua hingga tiga juta rupiah per hektarnya. Kepemilikan tanah luas di Lhokcane memunculkan permasalahan baru bagi Ghofar lantaran ketiadaan tenaga kerja. Permasalahan itu berhasil dipecahkannya ketika situasi konflik antara

GAM dan pemerintahan Republik Indonesia mulai mereda.

Bersamaan dengan upaya pemerintah NAD untuk mengembalikan para korban konflik ke daerah NAD, Ghofar pun menjalin relasi dengan Sholeh. Ia merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kawasan Sumatra Utara. Tujuan relasi diantara keduanya yaitu mengumpulkan kembali para korban konflik yang melarikan diri ke Sumatra Utara. Proses pengembalian ini diwadahi oleh sebuah organisasi yang bernama Himpunan Masyarakat Korban Konflik Aceh (HMKKA). Atas kerjasama kedua belah pihak tersebut, beberapa korban konflik itu kemudian dipindahkan ke daerah Lhokcane yang sebagian besar tanahnya telah dikuasai oleh Ghofar.

Berdasarkan situasi diatas, terlihat jelas bahwa hubungan Ghofar dan Sholeh dalam rangka pencarian calon tenaga kerja. Hal ini dikarenakan Ghofar memiliki tanah luas serta modal yang nantinya berasal dari berbagai macam program perkebunan. Namun permasalahannya justru terletak pada tenaga kerjanya. Melalui HMKKA, Ghofar mampu mendapatkan tenaga kerja guna mengolah tanahnya di Lhokcane.

Beberapa program penanaman jagung maupun perkebunan tebu selanjutnya dibudidayakan diatas tanahnya hingga tahun 2012 ketika Ghofar tidak lagi berkuasa sebagai Bupati. Bersamaan dengan hal itu, para pengurus HMKKA di Lhokcane seringkali memiliki kontrol atas petani yang mampu mengakses tanah dan program bantuan tebu. Realitas itu dikarenakan mereka adalah kepanjangan kuasa Ghofar sebagai pemilik tanah dan penguasa pemerintahan di Bener Meriah, khususnya di wilayah Lhokcane.

Terbentuknya HMKKA

Sekitar tahun 2005, perdamaian diantara pemerintah propinsi NAD dan Republik Indonesia kembali terjalin. Kondisi keamanan di wilayah tersebut perlahan kembali kondusif. Meskipun demikian, populasi penduduk di kawasan NAD berkurang akibat adanya konflik. Sebagian dari mereka terbunuh. Sementara yang lainnya melarikan diri ke luar dari wilayah NAD.

Salah satu wilayah yang menjadi pelarian para korban konflik Aceh yakni di propinsi Sumatra Utara. Wilayah ini secara geografis berdekatan dengan propinsi NAD. Kawasan itu tergolong aman dari gangguan GAM ketika konflik berkecamuk. Terlebih lagi, masyarakat keturunan Jawa kebanyakan berasal dari daerah Sumatra Utara. Tidak heran apabila mereka memilih kembali ke kampung halamannya. Usai perdamaian terjalin diantara pihak yang berkonflik, pemerintah provinsi NAD menghimbau para warganya yang melakukan eksodus supaya kembali ke Aceh.

Walaupun demikian, para pengungsi merasa khawatir akan kondisi keamanan di Aceh. Mereka masih trauma akibat perang yang telah berlangsung cukup lama. Melihat situasi tersebut, salah seorang tokoh masyarakat di Sumatra Utara memutuskan untuk membentuk sebuah perhimpunan masyarakat korban konflik Aceh. Sholeh, begitulah ia biasanya dipanggil. Ia merupakan warga Sumatra Utara yang seringkali mengumpulkan massa dikala ada pemilihan umum.

Relasi yang dimilikinya cukup luas di kalangan para pejabat tingkat propinsi Sumatra Utara maupun NAD. Ia pun menawarkan diri membantu pihak pemerintah propinsi NAD dalam mengumpulkan kembali warganya yang eksodus ke Sumatra Utara. Perkumpulan tersebut kemudian diwadahi oleh sebuah organisasi yang bernama HMKKA. Pembentukan himpunan ini bertujuan untuk mengumpulkan kembali warga Aceh yang eksodus ke Sumatra Utara akibat adanya konflik.

Himpunan ini untuk selanjutnya diketuai oleh Sholeh yang membawahi beberapa koordinator di setiap wilayah. Melalui berbagai macam mekanisme, Sholeh, sebagai ketua HMKKA berhasil mengumpulkan massa. Pengumpulan massa tidak dilakukannya secara individu, melainkan mendapatkan pertolongan dari pengurus HMKKA yang lainnya. Setiap wilayah di Sumatra Utara memiliki koordinator tersendiri yang bertugas mengumpulkan para korban konflik aceh. Sesuai dengan perintah ketua HMKKA, seluruh koordinator wilayah membujuk para korban konflik supaya bergabung kedalam himpunannya.

Para pengurus HMKKA kemudian menjanjikan bahwa nantinya para korban konflik akan diberikan rumah, tanah perkebunan seluas 1 hektar, dan uang tunai senilai 10 juta. Janji yang dilontarkannya hanya akan terwujud apabila mereka tergabung kedalamnya. Melihat janji yang ditawarkan, para korban konflik tertarik bergabung dengan himpunan tersebut.

Sholeh pun menawarkan lokasi pemindahan para anggota HMKKA ke wilayah Kabupaten Bener Meriah. Tawaran itu diterima oleh pihak pemerintah kabupaten Bener Meriah karena Sholeh memiliki kedekatan relasi dengan, Ghofar, seorang Bupati di kabupaten Bener Meriah. Di samping itu juga karena adanya daerah kosong yang berada di kawasan ini. Maka dari itu, sebagian anggota HMKKA dialokasikan ke wilayah Bener Meriah.

Pada pertengahan tahun 2006, dusun Lhokcane kembali berpenghuni. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang menjadi lokasi pemindahan para anggota HMKKA. Sebanyak 136 kepala keluarga para anggota HMKKA yang dikirimkan ke dusun ini. Keadaannya tergolong masih sepi akibat telah ditinggalkan oleh masyarakat eks. Lhokcane. Di dusun inilah

sejumlah warga aceh yang sebelumnya eksodus ke Sumatra Utara dikembalikan lagi ke propinsi NAD. Akan tetapi, mereka berada di lokasi yang berbeda dengan domosilinya sebelum konflik aceh meledak. Alhasil, warga yang sebelumnya berdomisili dari berbagai wilayah kabupaten di propinsi Aceh, kini harus menata ulang kehidupannya di dusun Lhokcane.

Sesampainya di dusun Lhokcane, para anggota HMKKA diminta oleh pemerintah daerah untuk mendirikan tenda. Kini mereka telah resmi menjadi masyarakat Lhokcane. Pendirian tenda tersebut ternyata bertujuan sebagai tempat tinggal sementara. Hampir selama dua tahun mereka menempati tenda tersebut. Hingga pada akhirnya, pemerintah nasional memberikan bantuan rumah sebanyak 90 rumah.

Disisi lain, pemerintah Bener Meriah meminta warga Lhokcane supaya mengolah tanah terlantar yang berada di sekitarnya. Mereka pun diperintahkan membuka tanah yang tertutup ilalang lebat. Dinas Perkebunan Bener Meriah kemudian memberikan bantuan modal untuk program tanaman kepada penduduk Lhokcane. Tanaman jagunglah yang menjadi tanaman perdana warga Lhokcane.

Penanaman jagung rupanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Atas adanya kegagalan penanaman ini, beberapa masyarakat Lhokcane memutuskan untuk meninggalkan dusunnya. Kondisi yang demikian didukung dengan ketidak pastian pencairan janji pemberian tanah dan uang dari pemerintah. Hingga kini, sebagian besar janji itu menguap tanpa bekas.

Kemunculan komoditas tebu

Kehadiran tanaman tebu di Indonesia bukanlah hal yang baru. Tanaman ini telah muncul ditengah masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial. Pihak Hindia Belanda yang memperkenalkan tanaman tersebut, khususnya kepada masyarakat Jawa. Munculnya tanaman tebu beriringan dengan kehadiran industri gula di Indonesia. Industri itu dimulai pada abad ke 17 ketika VOC mengusahakan kirakira seratus perkebunan gula di sekitar Batavia (Mubyarto,1984, p.3).

Sampai pada akhirnya, tanaman tebu menjadi komoditi yang hingga kini masih diproduksi. Berbicara mengenai komoditi, Marx mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan dan mampu memuaskan keinginan manusia, baik bersifat fisik maupun simbolik (dalam Hudayana, 2012:68) . Dengan kata lain, komoditi merupakan suatu barang yang memiliki nilai untuk diperdagangkan.

Begitu juga yang berlangsung dalam perkebunan tebu di Lhokcane. Tanaman tebu menjadi komoditi di tengah masyarakat Lhokcane. Mereka melakukan pengolahan tanaman tebu

dengan tujuan memperoleh keuntungan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Peristiwa merebaknya komoditi tebu tergolong belum terlalu lama. Tanaman ini mulai hadir semenjak tahun 2010. Pemerintah kabupaten Bener Meriah yang pertama kali memperkenalkannya kepada warga Lhokcane. Introduksi komoditi ini dilakukan melalui program bantuan perkebunan tebu. Pengadaan program itu ditujukan kepada masyarakat Lhokcane dan sekitarnya. Warga Lhokcane pun tertarik pada kebijakan tersebut. Alhasil, perkebunan tebu mulai melanda kawasan ini dan menggantikan komoditi jagung yang sebelumnya mewarnai wajah perkebunan di Lhokcane.

Peluncuran kebijakan itu kenyataannya berpengaruh pada pembentukan moda produksi. Secara konseptual, Marx merumuskan bahwa inti dari sistem ekonomi adalah moda produksi (*mode of production*) yang bermakna suatu jalinan antara kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan produksi (Mulyanto, 2012 , p.xiv). Kedua unsur itulah yang nantinya membentuk suatu moda produksi didalam masyarakat.

Secara lebih jauh, kekuatan produksi bisa diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengolah dan mengubah alam guna menghasilkan pemenuhan kebutuhan material (Mulyanto, 2011, p.61). Melalui kekuatan inilah barang mentah diolah untuk menghasilkan komoditi yang mampu diperdagangkan. Beberapa unsur dalam kekuatan produksi antara lain : sarana produksi, manusia dengan kemampuan masing-masing,dan bahan bakuserta perkembangannya dalam produksi. Secara singkat, kekuatan produksi mengandung tanah, tenaga kerja, dan modal (*Land, Labour and Capital*).

Situasi itu dapat dilihat pada aktivitas produksi tebu di kalangan petani Lhokcane. Jika mereka menggunakan tanah untuk menghasilkan tanaman tebu, maka tanah, petani dengan segala kemampuannya, pengetahuannya, serta tenaga kerjanya adalah kekuatan- kekuatan produksi. Apabila proses produksi tebu menggunakan mesin zonder, truk pengangkut dan pabrik tebu, maka kedua teknologi itu juga dinamakan sebagai kekuatan produksi. Disisi lain, hubungan produksi juga memainkan peranan penting pada proses terbentuknya mode produksi.

Hubungan produksi tiada lain adalah seperangkat hubungan sosial antar orang yang secara langsung terpaut dengan kegiatan produksi (Mulyanto, 2011, p.61). Berlangsungnya hubungan ini acapkali terjalin antar individu atau kelompok yang memiliki alat produksi tidak sama di dalam suatu aktivitas produksi. Keadaan ini bisa dipahami pada aktivitas peminjaman tanah untuk keperluan produksi komoditi tebu antara tuan tanah dan petani miskin. Si petani miskin menggarap

tanahnya sementara tuan tanah membiayai keseluruhan biaya produksi. Hasil dari produksi tanaman itu kemudian dibagi dua. Oleh sebab itu, mekanisme peminjaman tergolong sebagai bentuk hubungan produksi antara kedua belah pihak.

Konsekuensi timbulnya perbedaan kepemilikan dan penguasaan atas kekuatan produksi, melahirkan hubungan produksi diantara para petani. Implikasinya sekaligus berimbas pada terbentuknya beberapa lapisan sosial ekonomi. Salah satunya yaitu kemunculan buruh tani yang dihuni oleh pihak penjual tenaga kerja.

Gambaran di atas sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi moda produksi kapitalis di Lhokcane. Tanpa golongan orang yang mengandalkan hidupnya dari menjual tenaga kerja, suatu perekonomian belum bisa dikatakan kapitalisme meski mungkin saja di dalamnya (terdapat) kegiatan produksi komoditi, pasar dan dorongan pencarian keuntungan menjadi unsur pentingnya (Mulyanto, 2012, p.21). Dengan munculnya pihak penjual tenaga kerja, maka tujuan kapitalisme untuk menghasilkan profit semaksimal mungkin dapat diwujudkan melalui penyerapan nilai surplus yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Hal ini dikarenakan terdapat pemisahan penguasaan alat produksi diantara pihak tuan tanah dengan tenaga kerjanya.

Kenyataan itu diperkuat dengan beberapa tanda yang mengarah pada berjalannya moda produksi kapitalis. Eric Wolf memaparkan beberapa ciri yang menandai berlangsungnya moda produksi itu (dalam Mulyanto, 2011, p.76). *Pertama*, berkembangnya kelas kapitalis yang dengan kekayaan uangnya bisa membeli tenaga kerja dan sarana produksi untuk memproduksi barang dagangan di pasar. Kelas kapitalis dalam konteks perkebunan tebu Lhokcane ditempati oleh pemilik tanah, modal dan tenaga kerja.

Kedua, kelas ini menguasai semua sarana produksi penting dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana-sarana produksi sehingga penjual harus menjual tenaga kerjanya pada kapitalis. Sarana produksi penting yang dikuasai seperti halnya tanah, pabrik tebu, mesin zonder, dan truk pengangkut tebu.

Ketiga, maksimalisasi laba melalui produksi yang dikuasai sepenuhnya oleh kapitalis. Melalui kepemilikan alat produksi itulah, para tuan tanah mampu mendapatkan keuntungan atas proses produksi tebu.

Memburu Akses Sumberdaya

Kisah Lugimin

Perburuan akses turut dilakukan oleh Lugimin. Sejak awal kedatangannya ia tidak memiliki sumberdaya ekonomi di kampung ini. Kemudian ia berupaya mengakses tanah dan program bantuan tebu. Nantinya ia berharap

kelangsungan kehidupannya bisa terjamin melalui kepenguasaannya atas sumberdaya ekonomi. Upaya perburuan program bantuan diutarakan oleh Lugimin ketika saya berkunjung ke rumahnya.

Suara adzan *ashar* mulai bergema dari seberang rumah ini. Tepatnya berasal dari *meunasah* (tempat ibadah kaum muslim) Lhokcane. Hari mulai sore, namun Lugimin belum juga nampak di rumah. Selang beberapa menit kemudian, terdengar suara mesin motor menuju ke tempat ini. Rupanya datang bersamaan dengan tetangganya yakni Pak Salim yang merupakan kepala dusun Lhokcane.

Mereka muncul dengan membawa beberapa ikat rumput. Rumputnya hendak dipakai untuk memberi makan kambing peliharaannya. Kambing itu merupakan produk bagi hasil dari kambing milik Salim. Dengan kata lain, Lugimin turut serta merawat kambing milik Salim. Nantinya, anak kambing pertama akan menjadi milik Lugimin sebagai bentuk upah atas perawatannya. Berawal dari aktivitas inilah relasi sosial diantara Lugimin dan Salim terjalin.

Gerimis mulai menderai ketika Lugimin telah selesai menuangkan rumput di kandang kambingnya. Melihat saya yang telah berdiri di belakang rumahnya, Lugimin mempersilakanku supaya masuk kedalam. Wajahnya terlihat letih tapi ia mencoba untuk tersenyum. Senyumnya agak kaku. Lugimin kemudian meminta ijin untuk membersihkan badan.

Ketika ia muncul kembali, wajahnya nampak lebih segar. Obrolan ringan mulai menghangatkan suasana dibawah guyuran hujan yang semakin deras. Pelan tapi pasti, cerita mengenai sejarah kedatangannya di Lhokcane mulai keluar dari mulutnya. Sebelum hadir di Lhokcane, Lugimin merupakan warga yang berasal dari kabupaten Langsa, NAD. Kedatangannya ke Lhokcane sekitar tahun 2011.

Berawal dari pertemuannya dengan salah satu koordinator anggota HMKKA, Lugimin diajak untuk bertani di Lhokcane. Informasi yang diterimanya mengatakan bahwa akan ada pembagian program bantuan perkebunan tebu oleh pemerintah Bener Meriah. Mendengar informasi tersebut, Lugimin mencoba melihat keadaan pemukiman Lhokcane. Kemudian ia memutuskan untuk bertempat tinggal di dusun ini. Sesampainya di Lhokcane, Lugimin mulai berkenalan dengan Salim sebagai kepala dusun. Bermula dari perkenalannya itu, ia meminta pekerjaan harian kepada Salim.

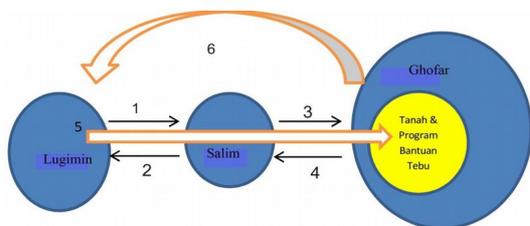
Kedekatan relasi sosial perlahan terjalin diantara Lugimin dan Salim. Relasi sosial ini terbentuk di kala Lugimin seringkali diminta untuk *mocok-mocok* (menjual tenaga kerjanya) di kebun tebu milik keluarga Salim. Di luar aktivitas berkebun, Lugimin turut serta memelihara kambing milik Salim. Nantinya, ia mendapatkan jatah seekor

hewan ternak apabila mampu merawatnya hingga beranak. Berawal dari aktivitas itulah Lugimin mendapatkan upah guna melangsungkan kehidupannya. Implikasinya, relasi sosial yang berupa hubungan patronase tercipta diantara kedua belah pihak

Selang dua minggu sejak Lugimin bertempat tinggal di Lhokcane, kabar mengenai pelaksanaan program bantuan tebu mulai terdengar. Sebagai salah satu ketua kelompok program tebu, Salim memasukkan Lugimin ke dalam anggotanya. Bersamaan dengan ini, Lugimin mampu memperoleh akses terhadap program bantuan tebu. Hal ini sekaligus kesempatan baginya dalam memperoleh penguasaan atas tanah perkebunan.

Melalui program itulah, Lugimin pada akhirnya mampu mengakses tanah milik Ghofar seluas 0,5 Ha. Hal ini dikarenakan program tersebut diwajibkan untuk ditanam pada tanah milik Ghofar. Selain itu, Salim juga tidak memiliki tanah semenjak kedatangannya di dusun ini.

Sebagaimana yang tergambar dalam kehidupan Lugimin, kita dapat menyaksikan bahwa ia berhasil mengakses tanah dan program bantuan. Perolehan akses itu melibatkan dua aktor yakni Lugimin dan Salim. Perolehan akses dilakukannya melalui mekanisme peminjaman. Timbulnya akses dilatarbelakangi oleh faktor relasi sosial. Relasi sosial ini berwujud hubungan patronase diantara Lugimin dan Salim. Disamping itu Salim merupakan orang kepercayaan Ghofar. Melalui faktor relasi sosial inilah, Lugimin mampu mendapatkan manfaat atas tanah pinjaman Ghofar serta program bantuan tebu pemerintah.



Gambar 1. Skema Hubungan Patronase

Keterangan :

1 = mocok-mocok kebun tebu sekaligus merawat ternak Salim.

2 = mendapatkan jaminan tenaga kerja

3 = makelar pembelian tanah dan penjaga kebun Ghofar

4 = jabatan kepala dusun dan ketua program bantuan tebu.

5 = mampu mengakses tanah dan modal program bantuan tebu.

6 = memperoleh tenaga kerja gratis dan kebun tebu usai 3 kali panen

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bagaimana Lugimin memperoleh akses pada program bantuan tebu. Akses itu tercipta karena dipengaruhi oleh faktor relasi sosial yang

berupa hubungan patron-klien diantara Lugimin dan Salim. Kajian Scott (dalam Ahimsa-Putra, 2007, p.4) terkait dengan faktor tersebut mendefinisikan hubungan patronase sebagai suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi, kepada patron.

Dalam hal ini, pihak tuan tanah memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggarap tanahnya. Fakta hubungan patronase ini nampak ketika kedua belah pihak saling melakukan pertukaran. Lugimin dalam hal ini melakukan *mocok-mocok* di kebun Salim. Selain itu ia juga merawat ternak Salim dalam kesehariannya. Melalui aktivitas tersebut, secara langsung Salim memberikan sumber penghidupan bagi Lugimin. Disisi lain, Salim memperoleh jaminan tenaga kerja dalam perawatan kebun tebu dan hewan ternaknya. Relasi sosial yang berupa hubungan patronase inilah yang kemudian menjadi aset awal Lugimin. Terbentuknya aset awal rupanya mempengaruhi proses perolehan akses pada tanah dan program bantuan tebu. Hal itu selanjutnya membentuk aset akhir yang berupa penguasaan atas kedua sumberdaya ekonomi tersebut.

Kisah Kartala

Sebagai seorang petani Lhokcane, Kartala tergolong senior. Ia telah menetap di dusun ini seiringan dengan kedatangan para anggota HMKKA. Kartala pun termasuk ke dalam salah satunya. Hingga saat ini, ia telah menuai kepemilikan lahan seluas 10 Hektar. Ia pun termasuk sebagai salah satu petani Lhokcane yang berada dalam lapisan sosial-ekonomi tuan tanah. Kepemilikan tanah diperolehnya melalui mekanisme pembelian. Pembelian dilakukan dengan mantan eks.warga Lhokcane yang berkeinginan menjual tanahnya.

Di kalangan petani Lhokcane, Kartala merupakan orang yang cukup berpengaruh. Selain memiliki tanah yang luas, ia menguasai beberapa faktor produksi vital lainnya. Faktor produksi yang dikuasainya yaitu pabrik tebu, truk dan *zonder* (mesin pengolah tanah). Berkaitan dengan hal itu, Kartala pun disegani oleh para petani Lhokcane yang lainnya. Terlebih lagi ia merupakan pengurus HMKKA.

Penguasaannya atas teknologi memberikan manfaat besar bagi Kartala maupun anggota keluarganya. Apabila pemerintah Bener Meriah meluncurkan program bantuan tebu, ia tak

pernah luput dalam mengaksesnya. Keadaan itu diungkapkannya ketika ia tengah sibuk menghitung uang hasil penjualan gula merah di pabrik tebu. "...Awak yang pegang pabrik (tebu) sama zonder. Mana berani mereka (para pengurus program) nggak masukin nama awak..", ujarnya dengan nada tinggi.

Kutipan di atas membuktikan bahwa penguasaan terhadap teknologi memiliki pengaruh pada perolehan akses ke program bantuan tebu. Sebagian besar komoditi sulit diolah tanpa adanya teknologi. Pihak yang menguasai teknologilah yang dapat mengakses sekaligus diuntungkan atas kehadiran komoditi tersebut (Peluso dan Ribot, 2003, p.165).

Kondisi ini terlihat ketika Kartala menguasai teknologi seperti halnya truk, mesin zonder dan pabrik tebu. Peranan teknologi terlihat dikala proses pengolahan tanah. Pengolahan ini menggunakan teknologi yang berupa mesin zonder. Sementara itu, proses produksi tebu membutuhkan truk dan pabrik tebu ketika memasuki masa panen. Truk berfungsi mengangkut tebu dari lokasi penebangan ke pabrik tebu. Di sisi lain, peranan pabrik tebu sangat vital untuk menghasilkan gula merah. Tanpa pabrik tebu, perkebunan tebu tidak akan berjalan.

Melihat situasi tersebut, teknologi yang dikuasai oleh Kartala berperan sangat vital dalam aktivitas produksi komoditi tebu. Keseluruhan petani tebu sangat tergantung pada teknologi tersebut. Oleh sebab itu, disaat program bantuan tebu menerpa kawasan Lhokcane, Kartala diikutsertakan kedalamnya oleh para pengurus program.

Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat memahami bahwa perolehan akses terhadap program bantuan tebu ketiga dipengaruhi oleh aset awal yang sebelumnya telah dimiliki Kartala. Aset awal yang mempengaruhi perolehan aksesnya antara lain teknologi dan identitas sosial. Untuk itu, ia kerap kali mampu menjaring kenikmatin dikala program bantuan tebu diluncurkan ke kawasan Lhokcane.

Tabel 1. Analisis Akses

N o	Nama	Aset Awal	Akses	Aset Akhir
1.	Lugimin	Relasi Sosial (hubungan patronase)	Menjadi anggota penerima program bantuan tebu sebanyak satu kali	Tanah, Tanaman Tebu, Modal Produksi dan Keuntungan Produksi
2.	Kartala	Teknologi, Modal (tanah),	Menjadi anggota penerima program	Tanah, Tanaman Tebu, Modal

		dan Identitas Sosial	bantuan tebu sebanyak dua kali	Produksi, Keuntungan Produksi dan Tenaga Kerja
--	--	----------------------	--------------------------------	--

Tabel diatas memperlihatkan bagaimana Lugimin dan Kartala mampu meraih manisnya program bantuan tebu yang mengalir di kawasan Lhokcane. Melalui aset awal yang mereka miliki, maka akses terhadap program bantuan tebu dapat diraihny. Hal ini pun kemudian berpengaruh pada aset akhir yang mereka kuasai. Sementara para petani Lhokcane yang tidak memiliki aset awal, nasibnya harus menjual tenaga kerjanya kepada para petani yang menerima program bantuan tebu. Dengan kata lain, mereka harus menjadi buruh tani di lahan yang dikuasai para tetangganya.

Kesimpulan

Lhokcane sebagai bekas daerah konflik Aceh hingga kini masih menyimpan permasalahan sosial ekonomi di tingkat lokal. Permasalahan ini semakin nyata ketika pemerintah kabupaten Bener Meriah mulai meluncurkan sebuah kebijakan berupa program bantuan tebu. Perebutan akses tanah dan program bantuan tebu rupanya berlangsung dengan berbagai macam mekanisme. Tanah di Lhokcane cenderung dikuasai beberapa pihak yang diperoleh dengan cara pembelian. Hal ini didukung dengan adanya tanah terlantar akibat konflik Aceh yang mengakibatkan rendahnya nilai harga.

Sementara itu, pihak yang tak bertanah berupaya keras dalam meraih sumber penghidupan tersebut. Melalui mekanisme peminjaman tanah mereka mampu mengaksesnya. Praktek eksploitasi tak terhindarkan diantara pemilik tanah dan penggarapnya. Terlebih lagi, pihak pemerintah Bener Meriah tengah giat melaksanakan program bantuan tebu. Kompetisi untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi pun mulai berlangsung diantara petani Lhokcane.

Keberhasilan dalam mendapatkan akses sumberdaya ekonomi tidak berlangsung secara alami. Proses perolehan akses dipengaruhi oleh aset awal yang sebelumnya telah dimiliki. Realitas ini terbukti ketika petani yang mempunyai aset awal berupa modal (tanah), identitas sosial, teknologi dan relasi sosial (hubungan patronase) seringkali mampu mengakses tanah maupun program bantuan tebu. Melalui kepemilikan aset awal tersebut para petani Lhokcane mendapatkan akses terhadap tanah maupun program bantuan tebu.

Selanjutnya, hal itu berujung pada penguasaan sumberdaya ekonomi baru. Di sisi lain, pihak yang tidak memiliki aset awal justru disingkirkan dari perolehan akses program bantuan tebu. Dengan kata lain, proses kompetisi ini

melahirkan orang menang dan kalah. Situasi inilah yang berimbas pada munculnya ketimpangan penguasaan tanah dan program bantuan tebu.

Daftar Pustaka :

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. (2007). *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan : Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Bachriadi, Dianto dan Wiradi, Gunawan. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Bina Desa, ARC dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Hudayana, Bambang. (2012). *Modul Mata Kuliah Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Li, Tania Murray. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. (Terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi). Jakarta Pusat: Marjin Kiri.
- Mubyarto. (1984). *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyanto, Dede. (2011). *Antropologi Marx: Karl Marx Tentang Masyarakat dan Kebudayaan*. Bandung: CV. Ultimius.
- Mulyanto, Dede. (2012). *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nooteboom, Gerben. (2003). *A matter of Style : Social security and livelihood in upland east Java*. Rotterdam: Grafische Communicatie.
- Peluso, Nancy Lee, Ribot, Jesse C. (2003). *A Theory of Access*. *Rural Sociology*, 68 (2), 153-181.
- Popkin, Samuel L. (1986). *Petani Rasional*. Yayasan Padamu Negeri: Jakarta.
- Tippe, Syarifudin. (2001). *El-Hurr: Nurani untuk Aceh*. Yogyakarta dan Banda Aceh: Pustaka Pelajar dan Yayasan Ulul Arham.